

Efektifitas Pelayanan Sosial dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya

Abdul Rufai Warfandu

¹ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: Arwarfandu6@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.431>

Article Info

Article History;

Received:

2024-05-02

Revised:

2024-05-028

Accepted:

2024-06-26

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program pelayanan sosial dan pembinaan anak jalanan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang menghadapi peningkatan jumlah anak jalanan dari 232 pada tahun 2020 menjadi 268 pada tahun 2022. Isu ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, keretakan keluarga, dan kurangnya perhatian orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan dari Kantor Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), LSM, serta tokoh masyarakat dan agama. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan, termasuk pembinaan pencegahan dan rehabilitasi, belum sepenuhnya efektif. Hambatan utama meliputi Pemerintah propinsi Papua Barat Daya belum memiliki Peraturan daerah untuk mengatur anak jalanan sehingga anggaran menjadi terbatas, sumber daya manusia, dan kurangnya sarana khusus. Faktor penyebab anak jalanan termasuk kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan penyimpangan kepribadian, dengan masalah utama adalah kurangnya perhatian orang tua akibat perceraian, perlakuan salah, dan kondisi ekonomi keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan anak jalanan di Kota Sorong, diperlukan peningkatan perhatian multisektor, penguatan regulasi daerah, dan penambahan alokasi anggaran. Monitoring dan evaluasi program serta pengembangan grand desain yang komprehensif juga penting untuk mendukung penanganan anak jalanan secara berkelanjutan.

Katakunci: efektivitas, pembinaan, anak jalanan, Papua Barat Daya

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat di berbagai bidang dan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia telah mempengaruhi sistem budaya dan nilai bangsa. Meski arus pertumbuhan dan pembangunan berjalan lancar, terjadi kesenjangan mencolok. Di satu sisi, banyak gedung megah dibangun, namun di sisi lain, kehidupan kaum miskin semakin memprihatinkan baik di perkotaan maupun pedesaan. Krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir juga memunculkan permasalahan sosial baru, termasuk peningkatan jumlah anak jalanan.

Anak adalah amanah dari Allah SWT yang perlu dididik dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu di bawah 18 tahun. Anak jalanan adalah mereka yang bekerja atau hidup di jalanan, menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sana dengan aktivitas seperti busking,

mengemis, menjual, dan bahkan terlibat dalam kegiatan kriminal untuk bertahan hidup (Margaretha, 2023).

Di Indonesia, jumlah anak terlantar mencapai 67.368 pada tahun 2022 (Rehsos, 2022). Menurut UU No. 35/2014, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sayangnya, banyak anak yang tidak mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua, terutama yang berasal dari keluarga miskin.

Kota Sorong, sebagai ibukota Provinsi Papua Barat Daya, juga menghadapi masalah anak jalanan. Jumlah anak jalanan di Sorong meningkat dari 232 pada tahun 2020 menjadi 268 pada tahun 2022. Faktor utama yang menyebabkan keberadaan anak jalanan di Sorong adalah kemiskinan (83,33%) serta keretakan keluarga dan kurangnya perhatian orang tua.

Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan. Namun, penanganan anak jalanan belum efektif sepenuhnya, terlihat dari fluktuasi jumlah anak jalanan setiap tahun dan tantangan dalam merubah mindset anak jalanan serta keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pelayanan sosial dan pembinaan anak jalanan di Kota Sorong serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata "effective" yang berarti berhasil atau melakukan sesuatu dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas memiliki tiga arti: adanya suatu efek, manjur atau mujarab, dan dapat membawa hasil atau hasil guna. Gibson dkk (1994) mendefinisikan efektivitas melalui pendekatan sistem, yaitu mencakup seluruh siklus input-proses-output dan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Menurut Sondang P. Siagian (2016), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas tidak sederhana, karena dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ukuran efektivitas meliputi kejelasan tujuan, strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, ketersediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian. Richard M. Steers (1985) mengukur efektivitas melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Pendekatan Efektivitas ada beberapa pendekatan dalam mengukur efektivitas: a) pendekatan sasaran (*goal approach*): mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai., b) pendekatan sumber (*system resource approach*): mengukur efektivitas melalui keberhasilan lembaga dalam mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkan., c) pendekatan proses (*internal process approach*):

menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal, dengan perhatian pada kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga.

Konsep Anak Jalanan

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 16 tahun yang telah terpisah dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terdekat, dan hidup berpindah-pindah di jalan raya. UU No. 35/2014 menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di tempat umum lainnya. Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bekerja atau berkeliaran di jalanan, dengan rentang usia 6-18 tahun.

Anak jalanan seringkali dianggap sebagai pekerja anak, tetapi mereka juga dipandang sebagai kelompok khusus yang memiliki banyak perbedaan dengan pekerja anak. Mereka dipaksa oleh keadaan untuk mempertahankan hidupnya dengan bekerja di mana saja dan kapan saja. Menurut Suyoto (2013), anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marjinal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang, yang sejak dini harus menghadapi lingkungan kota yang keras.

Kategori Anak Jalanan, menurut Indah dan Amin (2014) dan penelitian Departemen Sosial RI dan UNDP, anak jalanan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, sebagai berikut: a) *children on the Street*: Anak-anak yang memiliki kegiatan ekonomi di jalan namun masih memiliki hubungan dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka diserahkan kepada orang tua untuk memperkuat ekonomi keluarga., b) *children of the Street*: Anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Kebanyakan mengalami kekerasan atau lari dari rumah, tetapi masih memiliki hubungan dengan orang tua., c) *children from Families of the Street*: Anak-anak yang hidup di jalan bersama keluarga mereka. Mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain, dengan kehidupan jalanan sejak bayi atau dalam kandungan.

Penelitian ini juga mengelompokkan anak jalanan menjadi empat kategori: anak yang hidup di jalanan tanpa hubungan dengan orang tua., anak yang bekerja di jalanan dengan hubungan yang tidak teratur dengan orang tua., anak yang rentan menjadi anak jalanan, masih tinggal dengan keluarga namun bekerja di jalanan., anak jalanan berusia di atas 16 tahun, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan.

Menurut Muslim (2014) faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan meliputi: a) tingkat mikro: Faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya, seperti lari dari keluarga atau dipaksa bekerja., b) tingkat meso: Faktor di masyarakat, seperti kebiasaan bekerja sejak dini dan migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan., c) tingkat makro: Faktor yang berhubungan dengan struktur makro, seperti peluang pekerjaan di sektor informal, urbanisasi, dan biaya pendidikan yang tinggi.

Model penanganan anak jalanan yang lazim digunakan antara lain: a) *street based*: mendatangi anak jalanan di tempat mereka berada, berdiskusi, dan memberikan pendidikan serta keterampilan., b) *centre based*: menangani anak jalanan di panti, memberikan makanan, perlindungan, pendidikan, dan keterampilan., c) *community based*

melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mencegah anak masuk ke kehidupan jalanan, memberikan pendidikan dan kegiatan yang bermanfaat.

Pendekatan yang dipilih tergantung pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh anak jalanan, dengan sikap empati dan komitmen sebagai modal awal yang penting.

Konsep Pelayanan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001: 646), pelayanan adalah perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan mengharapkan imbalan (uang atau jasa), serta kemudahan yang diberikan sehubungan dengan barang dan jasa. Alfred J. Khan, yang diterjemahkan oleh Muhiddin (1992:41), mengemukakan dua macam pengertian pelayanan sosial: pelayanan sosial dalam arti luas mencakup fungsi pengembangan dan pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja, dan sebagainya. Pelayanan sosial dalam arti sempit disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial, mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang kurang beruntung seperti anak terlantar, keluarga miskin, cacat fisik dan mental, tuna sosial, dan sebagainya.

Pelayanan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang bertujuan untuk menyebarkan kesejahteraan. Efektivitas pelayanan sosial tercapai jika tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil yang dicapai. Fungsi Pelayanan Sosial menurut Fahrudin (2012) menyatakan bahwa pelayanan sosial bertujuan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial. Pelayanan sosial cenderung ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus.

Fungsi pelayanan sosial menurut Fahrudin (2012:54) meliputi: 1) sosialisasi dan pengembangan yang focus pada meningkatkan interaksi sosial dan pengembangan individu., 2) terapi, pertolongan, dan rehabilitasi yang focus pada perlindungan sosial dan perawatan pengganti., dan 3) akses, informasi, dan nasihat yang focus memberikan informasi dan nasihat kepada masyarakat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai: a) peningkatan kondisi kehidupan masyarakat., b) pengembangan sumber-sumber manusia., c) orientasi masyarakat terhadap perubahan sosial dan penyesuaian sosial dalam mobilisasi dan penciptaan sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan., dan d) penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk fungsi pelayanan yang terorganisasi (Muhidin, 1992:42).

Richard M. Titmuss dalam Muhidin (1992:43) menambahkan fungsi pelayanan sosial dari perspektif masyarakat sebagai ada empat, yaitu: a) meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat untuk masa sekarang dan masa depan., b) melindungi masyarakat., c) program kompensasi bagi orang-orang yang tidak mendapat pelayanan sosial., dan d) investasi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Selain fungsi di atas di atas pelayanan sosial mampu menciptakan partisipasi anggota masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dengan tujuan berupa terapi

individual dan sosial, serta mengatasi hambatan-hambatan sosial dalam pembagian politik.

Konsep Pembinaan

Pembinaan, menurut Syaepul (2017, hlm. 52), adalah upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab untuk menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat serta kemampuan individu sebagai bekal untuk meningkatkan dan mengembangkan diri sendiri, sesama, maupun lingkungan menuju tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri. Aruan (2019:1175) menjelaskan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis:

1. Mengatur strategis: manajer SDM dan pembinaan harus bekerja sama dengan manajemen untuk memastikan pembinaan terhubung secara strategis dengan rencana bisnis strategis guna meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
2. Merencanakan: perencanaan bertujuan menghadirkan pembina yang membawa hasil positif bagi organisasi dan karyawan, dengan mengidentifikasi serta menciptakan tujuan dan harapan pembinaan yang dapat diukur untuk melacak efektivitasnya.
3. Mengorganisasi: menentukan cara pelaksanaan pembinaan dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
4. Memberi Pembinaan: mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pembinaan memenuhi tujuannya, mengidentifikasi kesalahan, dan meningkatkan efektivitas pembinaan di masa depan.

Untuk mewujudkan tujuan pembinaan di atas maka pelaksanaan pembinaan melalui tahapan: a) pembinaan pencegahan, pembinaan pencegahan dilakukan secara berencana dan teratur untuk menghentikan kemunculan anak jalanan melalui pemantauan, pengawasan, pengendalian, pendataan, dan sosialisasi. Pembinaan ini meliputi: pendataan oleh Dinas Sosial, Pemantauan-pengendalian dan pengawasan, sosialisasi dilakukan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik., b) pembinaan lanjutan, pembinaan ini bertujuan meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak-anak jalanan dengan cara memberi perlindungan dengan membuka posko di jalan dan tempat-tempat umum pada titik-titik rawan untuk menghentikan anak jalanan turun ke jalan, penampungan sementara, dan pengungkapan serta pemahaman masalah dengan Teknik assessment., c) rehabilitasi sosial, upaya rehabilitasi sosial meliputi proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial agar penyandang masalah kesejahteraan dapat menjalankan kembali fungsi sosialnya. Upaya rehabilitasi bagi anak jalanan usia produktif meliputi: mimbingan mental spiritual, bimbingan fisik dan bimbingan Sosial.

Kerangka pikir penelitian ini bertujuan menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penelitian karya ilmiah mengenai efektivitas pelayanan sosial dan pembinaan anak jalanan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi efektivitas pelayanan sosial dan pembinaan anak jalanan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Metode kualitatif dipilih karena peneliti memanfaatkan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, maupun gambar untuk menarik kesimpulan, dengan peneliti sebagai instrumen kunci (Creswell, 2016). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan sosial serta faktor-faktor yang menghambatnya.

Obyek penelitian meliputi efektivitas pelayanan sosial dan pembinaan anak jalanan, faktor penghambat, serta pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Sorong, LSM Pemerhati Anak, lembaga sosial, tokoh masyarakat, agama, dan adat. Penelitian ini dilakukan di Kota Sorong karena tingginya angka anak jalanan di daerah tersebut. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan yang relevan, sementara data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang kredibel. Data primer dan data sekunder diintegrasikan ke dalam konten analisis dalam formulasi hasil penelitian yang valid (Sugiyanto, 2021).

Hasil dan Disuksi

Penelitian ini mengkaji peran berbagai pihak dalam pembinaan dan penanganan anak jalanan di Kota Sorong melalui wawancara dengan beberapa informan dari Kantor Dinas Sosial, panti sosial, LSM pemerhati anak, serta tokoh masyarakat, adat, dan agama diperoleh data sebagai berikut:

Peran Kantor Dinas Sosial Kota Sorong dalam Pembinaan Anak Jalanan

Kantor Dinas Sosial Kota Sorong berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak jalanan melalui beberapa program, yaitu: a) Program Pembinaan Pencegahan: fokus pada pencegahan anak-anak menjadi anak jalanan, b) Program Pembinaan Lanjutan: program ini mengarahkan anak-anak yang sudah terlanjur menjadi anak jalanan agar tidak mengganggu ketertiban Masyarakat, dimotivasi bersedia mengikuti pembinaan dengan tinggal di LKSA dan atau kembali pada keluarga, c) Program Pembinaan Rehabilitasi: program rehabilitasi sosial focus pada upaya membantu anak jalanan kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan pendidikan yang memadai, ketrampilan dan pendidikan yang memadai bisa diikuti dengan program kerja paket dan latihan baik melalui latihan di LKSA maupun di Dinas Tenga Kerja ataupun pelatihan yang diselenggarakan LSM.

Selain program pencegahan, lanjutan, dan rehabilitasi, Kantor Dinas Sosial juga melibatkan masyarakat dalam penanganan anak jalanan, dengan adanya pantai-panti swasta dan rumah perlindungan sosial yang didirikan berdasarkan inisiatif Masyarakat, jadi Masyarakat memiliki peluang luas untuk membantu pemerintah dalam penanganan anak jalanan.

Pemda dalam Menterjemahkan Kebijakan Pusat

Pemda Sorong berusaha menterjemahkan kebijakan pusat dengan menyediakan rumah singgah dan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang bertujuan mendidik anak jalanan dari segi pendidikan, moral, dan agama. Untuk mendukung program di atas Pemda Sorong telah mengajukan rancangan peraturan daerah terkait penanganan anak jalanan. Sampai penelitian ini berlangsung pengesahan regulasi tersebut terhambat oleh keterbatasan anggaran. Fakta sampai hari ini Pemda Sorong belum memiliki peraturan daerah yang mengatur pembinaan dan pengasuhan anak jalanan.

Data kinerja pelaksanaan program penanganan anak jalanan pemda Sorong telah melibatkan Masyarakat, namun hasilnya masih belum signifikan karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Atas keterbatasan tersebut Pemda Sorong melalui Dinas Sosial melakukan pembinaan secara collaborative dengan stakeholder terkait sektor non pemerintah seperti LSM dan tokoh Masyarakat.

Karena keterbatasan sarana dan prasarana, tingkat keberhasilan penanganan anak jalanan di Kota Sorong masih belum maksimal, walaupun perkembangan anak jalannya setelah hadirnya Dinas Sosial ada sedikit perubahan perilaku anak jalanan setelah ditangani oleh LKSA, namun belum signifikan.

Kinerja yang terkait dengan kebijakan yang diambil antara lain kerjasama dengan dinas pendidikan untuk pelaksanaan pendidikan atau ujian bagi anak putus sekolah dan pembuatan kartu BPJS Kesehatan untuk anak jalanan, dan melibatkan pihak swasta dalam penanganan anak jalanan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian program optimalisasi melibatkan pencegahan, lanjutan, dan rehabilitasi yang dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak masih perlu dan terus ditingkatkan.

Hambatan yang Dihadapi

Hambatan utama yang dihadapi Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan adalah kurangnya sumber daya manusia yang mau bekerja secara sukarela dalam urusan sosial serta kekurangan anggaran. Atas dasar itu Dinsos perlu mengerakan pilar-pilar sosial sebagai kelompok relawan yang berbasis Masyarakat.

Relawan sosial dapat membantu memotivasi para orang tua dan Masyarakat umum agar anak-anaknya tidak ikut arus anak jalanan, sebab masalah utama munculnya anak jalanan di Kota Sorong karena kurangnya perhatian dari orang tua yang disebabkan dari perceraian, perlakuan salah, ekonomi keluarga yang terbatas, dan pendidikan orang tua yang rendah. Kendala utama adalah kurangnya anggaran dan sumber daya manusia yang berkompeten.

Keterlibatan masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta merupakan aspek penting dalam penanganan masalah ini. Meskipun ada beberapa perubahan positif dalam perilaku anak jalanan yang ditangani oleh LKSA, hasilnya belum signifikan karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan anak jalanan, diperlukan peningkatan perhatian dari berbagai pihak, penguatan regulasi dan kebijakan daerah, serta peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang berkompeten.

Selain itu, monitoring, evaluasi, dan pemetaan lokasi anak jalanan serta usulan dan grand desain yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk mendukung program-

program yang ada. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya kerjasama multisektor dan komitmen dari berbagai pihak dalam menangani masalah anak jalanan secara efektif dan berkelanjutan di Kota Sorong.

KESIMPULAN

Penelitian ini menilai efektivitas program pelayanan sosial dan pembinaan anak jalanan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan menemukan bahwa meskipun Dinas Sosial dan pihak terkait telah melaksanakan berbagai upaya seperti program pencegahan, lanjutan, dan rehabilitasi serta menjalin kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta, hasilnya masih belum memuaskan. Kendala utama yang menghambat efektivitas program adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Faktor penyebab keberadaan anak jalanan di Sorong meliputi kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan penyimpangan kepribadian, dengan masalah utama seperti kurangnya perhatian orang tua akibat perceraian, perlakuan salah, dan kondisi ekonomi keluarga yang buruk.

Keterlibatan masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta terbukti penting dalam penanganan anak jalanan, namun hasil yang dicapai oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) belum signifikan karena terbatasnya fasilitas dan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, penguatan regulasi dan kebijakan daerah, serta peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten, diikuti dengan monitoring, evaluasi, dan pemetaan lokasi anak jalanan serta usulan grand desain yang komprehensif. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama multisektor dan komitmen dari berbagai pihak untuk menangani masalah anak jalanan secara efektif dan berkelanjutan di Kota Sorong.

Saran disampaikan antara lain: onitoning dan evaluasi serta pemetaan lokasi anak jalanan, pengajuan dana dalam pelaksanaan program, pnyediaan SDM pekerjaan sosial yang berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, 2012, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Bagong Suyanto , Sri Sanituti Hariadi. (2000) .Pekerja Anak Masalah, Kebijakan, dan Upaya Penanganannya. Surabaya : Lutfiansyah Meditama.
- Bagong Suyanto, 2010. Masalah Sosial Anak. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Fajar Interpretama MandiriMetodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Sugiyono. 2010.
- Budi Hasanah, Liza Diniarizky Putri, 2018. "Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah)". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Serang Raya, Indonesia.*
- Cambel, J.P. 1989. Riset dalam Efektivitas Organisasi, terjemahan Salut Simamora. Jakarta : Erlangga.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung Sudarmanto. 2009.

- Creswell W. John. 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 2004. *Acuan Umum Pelayanan Sosial Anak Di Panti Sosial Asuhan Anak*. Jakarta : Departemen Sosial RI.
- Dimianus Ding, *Efektifitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol.02 No.02 (Februari, 2014).
- Fauzi Rahman, 2020. "Model Penanganan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas PGRI Palangka Raya.*
- Gibson, dkk.1984. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. (Terjemahan : Djoerban Wahid). Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Indah dan Amin (2014). *Kehidupan anak Jalanan*. *Jurnal Anak Jalanan*. 11:5:44-62.
- Irwanto, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia : Analisis Situasi*, Jakarta : KPM Unika Atma Jaya. Masduki, 2003. *Radio Siaran dan Demokratisasi, Jendela: Yogyakarta*.
- Kalida, Muhsin dan Bambang Sukamto. *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*. Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2012.
- M. Fadhil Nurdin. 1998. *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Penerbit Angkasa. Moh. Nazir. 2003.
- Margaretha Sinaga . (2023). [Permasalahan umum yang dialami anak jalanan, Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang](#). Vol. 9, Iss: 1, pp 868-875.
- Muslim (2014). *Faktor Dominan Anak Menjadi Anak Jalanan*. *Jurnal Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS). Patton 1998.
- Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi*, Jakarta : Airlangga, 1990
- Siagian, Sondang P. 1986. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Penerbit Gunung Agung
- Soetarso, 1993. *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sondang P. Siagian. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyanto Sugiyanto. (2021). *Dampak Triangulasi Hasil Terhadap Keberlanjutan Organisasi Dalam Penelitian Kualitatif Studi Kasus di LKS Hamba DIY*, *Jurnal MEDIA BINA ILMIAH*, Jilid 16 (8). Halaman 7219-7232.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Suyoto Danang. 2013. *Teori Kuesioner dan Analisis Data*: Yogyakarta: GRAHA ILMU

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Yuniarti Miftahul Jannah, 2021. "Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bosowa.

Sumber non buku :

<http://dinsos.papuabarat.do.id>

<http://rehsos.depsos.do.id>

[Bukharistyle.blogspot.com](http://bukharistyle.blogspot.com) :2012 Apa Pengertian Dari Pembinaan.

Lesmana, 2012 (15 Mei). Definisi Anak.

<http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak> 55107a5681331157